

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta:2041
- Budiman, 2020. “Pembkab OKI Serius Wujudkan Akuntabilitas Kinerja”. <https://www.bakup.kaboki.go.id/index.php/component/k2/item/1117-pembkab-ok-i-serius-wujudkan-akuntabilitas-kinerja>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 13.26
- Committee of Sponsoring Organization (COSO) Of The Treadway Commission. 2013. *Internal Control – Integrated Framework:Executive Summary*. COSO. Mei 2013
- Dewata, Evada dkk. 2020. “Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 8 (3), 2020, 541-550
- Dewi, A., Mulyaning, W., & Herwin, K. 2020. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wiliayah Jakarta Selatan”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 9, No. 2 , Juli 2020*.
- Gebyvia, S., Taufeni, T., & Julita. 2020. “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Apakah Dipengaruhi Kompetensi Aparatur, Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan”. *Vol. 1, No.2, Juli 2020,pp. 183-200, E ISSN 2721-1819*.
- Hafiz, M. 2017. “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, ketaatan pada peraturan perundangan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi, Vol. 4, Faculty of economics Riau University, Pekanbaru*.
- Hidayatullah, Afilu, Irine Herdjiono. 2015. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Dimerauke”. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin*

*Ilmu & Call For Papers Unisbank ISBN : 978-979-3649-81-8. Universitas Musamus Merauke.*

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2011). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015,versi 1,4) <https://kbbi.web.id/aparatur> (diakses pada 17/03 2021)

Krismiaji, K. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*, Unit Penerbit, Yogyakarta.

LAN & BPKP, 2000. Akuntabilitas dan *Good Governance*. Penerbit LAN.

Manullag, S. B. dan S. Abdullah. 2019. Pengaruh Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pergantian Kepala SKPD terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4(1): 62-73.

Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta. Krismiaji. 2012. *Sistem Informasi Akuntansi*, Akademi Manajemen Perusahaan YPKN, Yogyakarta.

Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat.

Murdil, Hendri. Anne Putri. 2020. “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kota Payakumbuh”. *Jurnal Ekonomi* 23 (1) Maret 2020 (50-66)

Paramitha dan Gayatri . 2016. “Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja”. *E- Jurnal Akuntansi*.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Priyatno, Duwi. 2018. *SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa & Umum*. Yogyakarta: Andi
- Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing..
- Pusdiklatwas BPKP. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi 5. Jakarta.
- Putri, E. M. N. 2015. Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *Jurnal Online Mahasiswa*, 2(1), 1-15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/8177>
- Raba, Manggaukang,. 2020. Akuntabilitas konsep dan Implementasi,.Edisi kedua. Universitas Muhammadiyah malang, Jl Raya Tlogomas, No. 246, Malang 65144.
- Rahmawanto, A. 2017. *Mengukur Indeks Profesionalitas ASN: Analisis Tujuan dan Kemanfaatan*, [Civil Aparatus Policy Brief], Badan Kepegawaian Negara
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tyson, Priansa, (2014). *Perencanaan dan Pengembangan SDM*. Alfabeta. Bandung.
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara

Wahyuni , 2014. “Pengaruh kejelasan sasaran, pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu)”. *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Wibowo, 2013. *Manajemen Kinerja, (Edisi Ketiga)*. Jakarta : Rajawali Pers.